

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, dapat disimpulkan:

1. Pembinaan kesadaran Bela Negara yang diberikan di wilayah kerja Kodam Jaya/Jayakarta berupa program dari Komando Atas maupun non program swadaya yaitu: Program kampung Pancasila yang sudah tersebar di 83 titik, Program *Army Go To School* untuk Satkowil, Menggalakkan kegiatan Saka Wira Kartika, dan Progja yang sudah menjadi kalender tahunan yaitu : Tar KBN, Komsos Cegah Tangkal Radikalisme/Separatisme. Kegiatan ini juga dibantu satuan lainnya yang berada dibawah naungan Kodam Jaya yang menyasar sasaran utama kaum milenial remaja yang dianggap paling rentan terkena dampak negatif globalisasi.
2. Faktor pendukung yang berkontribusi dalam penguatan PKBN adalah SDM yang kompeten untuk memberikan pelatihan PKBN didukung dengan sarana prasarana yang memadai. Namun demikian, ada dua jenis faktor penghambat dalam penguatan PKBN, yaitu secara internal : Bagi generasi muda masih terkonsep bahwa Bela Negara adalah tugas TNI dan Polri; Masih beranggapan bahwa Bela Negara harus dengan mengangkat senjata sehingga harus ada program Wajib Militer untuk generasi muda; Kuatnya pengaruh budaya dari luar sehingga mampu merubah pola pikir generasi milenial bahwa Bela Negara adalah sesuatu yang tidak penting, hanya membuang-buang waktu, tenaga dan pikiran. Faktor penghambat secara external, yaitu keterbatasan anggaran untuk pembinaan KBN, dan kurang terstruktur secara sistematis untuk instansi yang menangani program KBN dengan jelas

3. Strategi yang oleh Kodam Jaya dalam rangka penguatan PKBN guna menghadapi tantangan globalisasi adalah dengan menargetkan tujuan utama (*ends*), yaitu untuk membentuk sikap patriotisme, disiplin tinggi, semangat berjuang dan SDM yang mengamalkan 5 nilai dasar bela negara agar dapat berkontribusi pada pertahanan negara yang akhirnya dapat menjaga keutuhan NKRI. Cara (*ways*) yang dilakukan oleh Kodam Jaya guna mewujudkan tujuan yang dijabarkan sebelumnya adalah dengan melaksanakan sosialisasi, pendampingan, serta pelatihan PKBN kepada masyarakat, khususnya kaum milenial remaja dengan menjalin koordinasi atau kerja sama dengan instansi terkait, Modal (*means*) yang Kodam Jaya miliki adalah sumber daya manusia atau pelatih yang dilengkapi dengan kelengkapan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk mewujudkan PKBN tersebut. Strategi tersebut dapat dioptimalisasi dengan upaya penguatan pada Pendidikan formal dan informal, ceramah dan keteladanan, diklat, seminar dan FGD, serta media komunikasi, informasi, internet, dan permainan *online*

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka dapat disarankan kepada:

1. Pelaksanaan penguatan pada Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara perlu dilaksanakan dengan terpadu, dalam kerangka sistem kesamaan antar lembaga yang berkepentingan, yaitu:
 - a. Kemhan RI agar menggalakkan program sosialisasi maupun penyeragaman dan distribusi modul yang dapat digunakan dalam PKBN termasuk dalam mendukung anggaran pelaksanaan PKBN baik di pusat, maupun di satuan-satuan berbagai wilayah Indonesia.
 - b. Kemendagri agar tetap menjalin kerja sama bersama dengan Kesbangpol di wilayah-wilayah daerah dengan memberikan

- pendampingan, dukungan dana, dan penyeragaman modul PKBN bersama Kemhan RI.
- c. Kemenkeu RI agar dapat memberikan persetujuan maupun dukungan anggaran atas ajuan program PKBN dari Kemhan RI sehingga dapat membentuk jutaan kader bela negara atau bahkan berbentuk Komponen Cadangan untuk Indonesia.
 - d. Kemendikbud RI agar dapat menyetujui PKBN sebagai suatu program *prerequisite* atau program wajib yang disampaikan pada awal Pendidikan formal dan tercantum dalam kurikulum pembelajaran di berbagai level Pendidikan formal lainnya.
 - e. Kodam Jaya/Jayakarta agar tetap konsisten Bersama satuan lainnya memberikan pengenalan maupun sosialisasi kepada masyarakat di wilayah kerjanya mengingat jumlah masyarakat yang cukup banyak dan dihadapkan dengan berbagai macam ATHG yang ada di DKI Jakarta.
 - f. Kesbangpol Prov DKI Jakarta agar tetap rutin melaksanakan kegiatan PKBN dalam bentuk wawasan kebangsaan Bersama dengan instansi lainnya, termasuk dengan TNI dan Polri.
2. Faktor penghambat utama berasal dari masyarakat itu sendiri, sehingga masyarakat umum maupun generasi milenial hendaknya membuka pikiran bahwa PKBN bukan suatu bentuk militerisasi kepada sipil mengingat hak dan kewajiban warga negara adalah ikut serta dalam Sishankamrata guna keutuhan NKRI.
 3. Dalam rangka optimalisasi penguatan PKBN, dukungan teknologi informasi menjadi penting yang dapat menyasar kaum millennial untuk lebih giat dalam mengikuti PKBN. Artinya bahwa, kegiatan PKBN perlu dikemas semenarik mungkin untuk menarik minat kaum millennial.
 4. Untuk kepentingan penelitian selanjutnya, maka disarankan dapat mengkaji Pembinaan Kesadaran Bela Negara dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).